

KONFRONTASI MILITER PEMBEBASAN PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF  
STRATEGI PERANG SEMESTA

Oleh

Mulyadi<sup>1)</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2)</sup> & I Wayan Mudhio<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pertahanan Indonesia

Email: <sup>1</sup>[mulyadi.zi98@gmail.com](mailto:mulyadi.zi98@gmail.com), <sup>2</sup>[lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id) &  
<sup>3</sup>[iwayan.midhio@idu.ac.id](mailto:iwayan.midhio@idu.ac.id)

**Abstarct**

The west papua issue will be discussed one year later. that was the explanation from the round table conference between representatives of indonesia and the netherlands. but after a year later, the dutch broke their promise to return west papua to the bosom of the indonesian motherland. the dutch continued to insist on wanting west papua as their land and then instead increased their military strength in west papua in preparation for defending the territory. responding to this, in an effort on salvaging west papua, indonesia initially made peaceful steps, namely through bilateral diplomacy within the indonesian-dutch union ties, continued with trilateral diplomacy and then diplomacy efforts using the asia africa and un organizations. however, diplomatic efforts met with deadlock, so that another option from diplomacy was forced to fight in. this study aims to review the military confrontation of the seizure of west papua in the perspective of universal war strategy related to the development needs of making the indonesian military deterrent effect. this research method uses a qualitative descriptive phenomenology quasi research method, using data sources from several books and journals available. the result of the research shows that indonesia absolutely needs a large and tough military force to maintain its sovereignty, protect natural resources and realize its national interests. without the deterrent effect of military power, indonesia will be underestimated in the international politics.

**Keywords: Deterrent Effect, Confrontation & Universal War Strategy.**

**PENDAHULUAN**

Dwitunggal Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun Proklamasi kemerdekaan belum sepenuhnya membebaskan rakyat Indonesia dari ancaman Kolonialisme. Belanda mengerahkan NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*), bermaksud kembali menguasai Indonesia dan menghukum mereka yang telah bekerja sama dengan pihak Jepang (Ricklefs, M.C. 1981. h.434).

Belanda kemudian melaksanakan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dan melancarkan agresi militer II pada 19 Desember 1948 dan berhasil merebut ibukota Republik

Indonesia Yogyakarta. Serangan Belanda memang tidak dapat dielakkan, obat pahit tersebut harus diminum rakyat Indonesia sebagai ujian atas kesungguhan hati untuk hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka. (Simatupang, 1960. h.21).

Kobaran perang kemerdekaan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, membawa kekalahan strategis dan politik bagi Belanda sehingga tergelar Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Negeri Belanda. Sebagaimana ditulis TB. Simatupang (1960) dalam bukunya "**Laporan dari Banaran**", Bung Hatta atas nama Delegasi Republik Indonesia di KMB menjelaskan, diakui atau tidak diakui, namun kami telah hidup sebagai Negara dan bangsa yang merdeka

sejak Proklamasi kemerdekaan. (h.319). Hasil dari KMB, diantaranya Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut wilayah Papua dan Papua Barat (Selanjutnya akan disebut: **Papua Barat**) tidak ikut disertakan, dijelaskan bahwa “Menegenai Papua Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan”.

Setelah setahun kemudian, Belanda ingkar janji untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Penundaan ini mengakibatkan Indonesia masih harus memikul beban sisa-sisa kolonialisme. Sengketa Papua yang berlarut-larut menyedot energi bangsa Indonesia. Dalam rentang tahun 1950 sampai dengan 1960, Indonesia melakukan jalan damai untuk mengembalikan Papua ke pangkuan Indonesia (Leirissa, 1992.h.2). Namun upaya diplomasi damai tidak memperoleh tanggapan yang positif sehingga Indonesia memilih jalan lain, yaitu konfrontasi militer.

## LANDASAN TEORI

### Tinjauan Ontologi ilmu pertahanan.

Ontologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan eksistensi dan hakekat hidup. Objek dari ilmu pertahanan mencerminkan perilaku negara untuk menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan. Ilmu pertahanan juga adalah ilmu tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara (2015.h.51). Kebutuhan untuk mempelajari masalah pertahanan secara filosofis berangkat dari keberadaan suatu entitas yang disebut negara (*state*) dan kebutuhan untuk mempertahankan diri (*Survive*) dari ancaman terhadap negara tersebut. Dengan kata lain, secara ontologis, kebutuhan sebuah negara dalam mempertahankan dan melestarikan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan

bangsa dari berbagai ancaman merupakan perwujudan objek formal dari ilmu pertahanan.

### Tinjauan Epistemologi ilmu pertahanan.

Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Ilmu pertahanan diperoleh dengan penelitian ilmiah yang menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi keduanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dengan melalui pendekatan *system thinking* menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan multimetode mengingat karakter permasalahannya kompleks dan problematis. Kriteria epistemologi ilmu pertahanan yang demikian ini disebut juga sebagai multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Dengan kata lain, membuktikan bahwa ilmu militer atau ilmu pertahanan bukan hanya “mainan” personel militer saja, tetapi masyarakat nir-militer pun sangat memberikan kontribusi pada pertahanan. Artinya, ikut sertanya atau berperannya unsur masyarakat sipil dalam urusan militer merupakan keniscayaan.

### Tinjauan Aksiologi ilmu pertahanan.

Ilmu pertahanan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pertahanan suatu negara. Dalam realitasnya ilmu pertahanan telah eksis sejak awal abad ke-20. Artinya ilmu pertahanan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pengembangan kebijakan pertahanan suatu negara, bahkan nilai manfaat itu turut pula dirasakan oleh dunia internasional, terutama bagaimana membangun hubungan antar negara yang harmonis, dinamis, dan damai. Menurut pendapat Octavian (2012), “Diskursus mengenai perkembangan dunia militer saat ini tidak terlepas dari dinamika globalisasi. Penjelasan-penjelasan mengenai perkembangan kekuatan militer di tiap-tiap negara mengarah pada satu upaya merespon perkembangan globalisasi yang mempengaruhi banyak segi kehidupan”. (p.18). Secara aksiologis, beberapa aspek kehidupan militer, ilmu militer, ilmu perang dan strategi menghadapi peperangan menjadi salah satu objek material dari studi ilmu pertahanan.

### Tinjauan literatur Strategi Perang Semesta

Literatur yang berkaitan dengan perang, perang total atau perang semesta serta buku tentang sejarah perang selalu menarik untuk dipelajari. Buku “**Perang Rakyat Semesta 1948-1949**”, yang ditulis oleh Yayasan 19 Desember 1948 memberikan gambaran perang kemerdekaan yang memuat himpunan dokumen berupa surat, kawat, pengumuman dan surat-surat resmi sejak tentara Belanda melancarkan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan Agustus tahun 1949. (Yayasan, 1994). Lampiran-lampiran yang berisi dokumen, surat, dan lembaran peta dimuat dari halaman 47 sampai dengan 173 buku ini.

Sedangkan buku “**Laporan Dari Banaran**” tulisan Mayjen TNI (Purn) T.B. Simatupang, memberikan argumentasi, narasi dan data yang lebih lengkap tentang peristiwa demi peristiwa sekitar perang kemerdekaan sejak jatuhnya Yogyakarta pada 19 Desember 1948 sampai dengan pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Penulisan secara detail hal-hal yang dialami langsung oleh Mayjen TNI (Purn) T.B. Simatupang merupakan kekuatan tersendiri buku ini. Nama “**Banaran**” menjadi lambang berpuluh-puluh ribu desa di tanah air yang menjadi pangkalan bagi perang rakyat selama masa perang kemerdekaan. (Simatupang, 1960.h.3).

Literatur lain yang cukup lengkap menjelaskan tentang Perang dan pengalaman selama perang kemerdekaan adalah karya-karya Jenderal Besar A.H. Nasution. Pengalaman perang terutama perang kemerdekaan Indonesia berhasil disarikan dalam tulisan yang diantaranya adalah; **Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Pokok-pokok Gerilya, buku-buku memoar Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, dan Memenuhi Panggilan Tugas** serta beberapa buku memoir lainnya.

Dalam buku “**Pokok-Pokok Gerilya**”, Nasution (1954) menyatakan bahwa Peperangan abad ini adalah perang rakyat

semesta. Dalam peperangan bukan hanya kedua belah pihak angkatan bersenjata yang berperang. Peperangan dewasa ini meminta sifat yang semesta, seantero rakyat baik harta dan tenaganya tersedia untuk diolah, untuk mencapai kemenangan. Semua sumber-sumber yang tersedia harus dipergunakan. Maka ilmu perang itu bukan cuma ilmu perang yang khusus dengan strategi, taktik dan logistiknya, melainkan pula politik militer, politik, psikologi dan ekonomi. Lapangan perang bukan lagi cuma yang militer, melainkan juga sepenuhnya politik dan ekonomi. Pimpinan perang bukan lagi mengenai medan militer, melainkan medan-medan seluruhnya secara semesta. Syarat-syarat yang diminta dari padanya bukan lagi keahlian cuma keahlian militer, melainkan pemahaman seanteronya politik, militer dan ekonomi. Maka sifat serangan adalah semesta, demikian pula yang diserang menggunakan pertahanan rakyat semesta.

Selanjutnya, buku yang cukup secara mendalam membahas tentang perang semesta ditulis oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) J.S. Prabowo tahun 2009 dengan judul “**Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta**”. Buku tersebut diatas menjadi literatur utama dalam penulisan artikel ini, yaitu Konfrontasi militer pembebasan Papua Barat dari perspektif strategi perang semesta.

Tabel 1. Konfrontasi militer pembebasan Papua Barat dihadapkan Karakteristik perang semesta sesuai buku Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta, dapat di lihat dibawah ini.

Aspek Peninjauan	Karakteristik Perang Semesta	Konfrontasi Pembebasan Papua
1	2	3
Generasi Perang	Perang generasi ke 4	Perang Generasi ke 4
Motif	Merdeka Revolusi Lawan Insurjensi Kedaulatan wilayah	Kedaulatan wilayah Merdeka
Musuh yang dihadapi	Militer Insurjen	Militer Lain-lain

	Teroris Lain-lain	
Wilayah Perang	Antar Negara Dalam satu negara	Antar Negara Dalam satu negara
Cara yang digunakan	Banyak cara, cara militer bukan satu- satunya cara utama	Banyak cara: Diplomasi, Politik, Ekonomi dan sosial
Peperangan Militer	Konvensional non- Konvensional	Konvensional dan Non konvensional
Pelaku	Komponen lain dan militer	Mobilisasi masyarakat dan militer

**Sumber:** Diolah dari Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta, hal. 65.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (2014.h.4). Sedangkan menurut Bungin bahwa salah satu format penelitian kualitatif adalah Format Deskriptif Kualitatif, yaitu pada umumnya penelitian dalam bentuk studi kasus (2007. h.69).

Penelitian sejarah merupakan penelaahan serta sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis (Sulasman, 2014. h.84). Karakteristik penelitian sumber-sumber informasi masa lampau ialah menggunakan studi pustaka atau literasi. Studi pustaka memiliki karakteristik, antara lain; 1) Penelitian ini tidak berhadapan langsung dengan informan, responden, atau data primer lainnya dari lapangan. Melainkan penelitian ini berhadapan langsung dengan data sekunder yang sudah ditemukan sebelumnya. 2). Data yang ditemukan sudah siap untuk dipergunakan (*ready to use*), artinya peneliti tidak perlu mencari tahu validitas datanya, atau tidak perlu mengkonfirmasi ulang kebenaran datanya. 3) Data yang diperoleh bisa dibuktikan

keandalannya (*reliable*). Hal ini disebabkan karena pustaka yang digunakan bersumber dari perpustakaan nasional/ sejarah nasional yang valid. 4) Data dari studi pustaka tidak terbagi ke dalam dimensi ruang dan waktu. Oleh karena keempat alasan kuat tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan studi pustaka atau literasi sebagai metode pengumpulan data.

Proses penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan literatur-literatur yang mempunyai kesamaan topik bahasan dengan penelitian ini, yaitu strategi perang semesta dan Konfrontasi militer pembebasan Papua. Proses berikutnya, melakukan pencatatan atas temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian penulis memadukan masing-masing temuan ke dalam klaster-klaster tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya, menganalisis masing-masing kluster, melihat sisi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing temuan. Proses terakhir, penulis memberikan pandangan atau gagasan yang baru, berdasarkan pemikiran yang ditemukan selama studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Strategi Perang Semesta.

Supriyatno menyatakan bahwa, “Strategi atau ilmu militer atau *military science* atau *art and science of war*, disebut juga ilmu perang dan secara kontemporer disebut Ilmu Pertahanan” (2014, h.44). Pendapat lain, “Ilmu pertahanan beririsan dengan ilmu perang dan juga ilmu militer, pertautan antara ilmu pertahanan menunjukkan ilmu militer merupakan bagian dari ilmu pertahanan” (Tippe, 2015, h.27). Selanjutnya disampaikan oleh Will Durant bahwa filsafat diibaratkan sebagai pasukan marinir merebut pantai pendaratan pasukan infanteri. Pasukan Infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Setelah itu, ilmulah yang membelah

gunung dan merambah hutan, memyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan (Sebagaimana dikutip dalam Tippe, 2015. h.33).

### **Konstelasi sebelum Konfrontasi militer pembebasan Papua Barat**

Dari konstruksi fakta sejarah yang berkaitan dengan dinamika pembebasan Papua Barat, dapat ditemukan beberapa hal penting yang berkaitan dengan konstelasi sebelum konfrontasi militer, lebih lanjut didapat data sebagai berikut;

#### **Bidang Diplomasi.**

Pada 19 Februari 1952, Belanda merubah konstitusinya dan memasukkan secara resmi wilayah Papua kedalam wilayah negaranya (Leirissa,RZ, 1992). Selanjutnya dalam urutan wilayah Belanda dan pembatasan wilayahnya mereka menggantikan nama Nederlands Indies dengan Nederlands Nieuw Guinea. Kemudian pada 29 Oktober 1952 Pemerintah Belanda memutuskan untuk tidak melakukan perundingan lagi dengan Indonesia mengenai status Irian Barat. Secara terstruktur, Belanda memperkuat militer dengan meluncurkan Undang-Undang yang memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengerahkan wajib militer demi pembangunan angkatan perangnya. Puncaknya kebijakan memperkuat militer di Papua di wujudkan dengan tibanya Kapal induk Karel Doorman dan pasukan pada bulan Mei 1960.

Mencermati sikap Belanda, Pemerintah Indonesia tidak gentar dan tetap berusaha untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Papua. Menyikapi Langkah-langkah diplomasi dan persiapan militer Indonesia, pada sidang umum PBB bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua, selanjutnya pada September 1961 Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua.

Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengajukan usulan dekolonisasi di Irian Barat, yang dikenal dengan “Rencana Luns”. Disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Belanda Luns, Rencana Luns menyerukan penarikan Belanda dari wilayah tersebut dengan penggantian oleh “komisi”, peran komisi menjadi pengawasan administrasi dan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memutuskan status akhir wilayah tersebut (Rollings, 2010). Sedangkan, rencana Luns berencana mengalihkan Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tindakan Belanda ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan persetujuan Konferensi Meja Bundar dan telah bertindak secara sepihak untuk menentukan status ketatanegaraan dan politik Papua. Karena upaya-upaya diplomasi Indonesia tidak berhasil, maka jalan selain dari diplomasi terpaksa harus ditempuh, yaitu melalui jalan peperangan.

#### **Bidang Ekonomi.**

Hubungan Jakarta dan Den Haag semakin tegang saat permasalahan ekonomi dijadikan alat politik. Pada tahun 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang nomor 86 Tahun 1957 yang memerintahkan di nasionalisasikannya semua perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Pengambilalihan perusahaan milik Belanda dilakukan oleh kaum buruh dan karyawan dibawah komando Jenderal A.H. Nasution selaku penguasa perang Pusat.

Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan antara lain: 1). Perusahaan perkebunan. 2) perusahaan listrik. 3) perusahaan perminyakan. 4) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia, Presiden Soekarno juga mengeluarkan kebijakan lain seperti; melarang pemutaran film-film bahasa Belanda, melarang maskapai penerbangan Belanda melintas di wilayah Indonesia, dan

melakukan aksi mogok buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda.

Kondisi di pengujung 1950-an, Republik Indonesia kembali diguncang krisis keuangan. Pada awal dekade itu, krisis serupa juga pernah menyerang. Tapi kali ini, keguncangan finansial tampaknya lebih fatal. Presiden Sukarno beserta perangkat pemerintahannya pun memberlakukan kebijakan darurat agar perekonomian negara tidak sekarat. Sanering (pemotongan nilai mata uang) hingga redenominasi (penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar) diterapkan. Namun kondisi sosial ekonomi semakin rumit dengan adanya beberapa konflik di dalam negeri dan permasalahan pembebasan Papua Barat yang menuntut pendanaan yang tidak sedikit.

### **Pembahasan**

#### **Tinjauan konfrontasi militer pembebasan Papua Barat dari Sebab Perang.**

Perang adalah Duel dalam skala yang luas.(Clausewitz, 1976). Perang adalah tindakan kekerasan yang ditujukan untuk memaksa lawan kita memenuhi keinginan kita. (van der Dennen, 2005). Perang hanyalah kelanjutan hubungan politik dengan campuran cara lain. Sedangkan Sun Tzu dalam bukunya Seni Berperang, berpendapat bahwa perang haruslah dilaksanakan sebagai “the last resort” kemenangan tanpa pertempuran.

Ada dua macam sebab terjadinya perang, yaitu teori lama dan teori Modern. Teori modern yang relevan yaitu teori penyebab Perang karena sebab demografis (Coccia & National, 2019). Teori ini berpendapat bahwa populasi negara bagian dengan kepadatan tinggi cenderung dicurahkan di negara-negara dengan populasi langka. Tingginya tekanan demografis suatu negara terhadap negara lain disebabkan oleh perbedaan rasio antar level populasi. Untuk menggambarkan pentingnya memahami alasan mana yang berada di balik konflik, maka perang dapat berlangsung lama.(Jackson & Morelli, 2011).

#### **Penyebab perang Pembebasan Papua Barat dari sisi Indonesia.**

Salah satu teori modern penyebab perang menyebutkan bahwa sebab perang dikarenakan Interaksi multilateral setiap kesepakatan potensial diblokir oleh negara atau koalisi negara. Usaha-usaha diplomasi damai Indonesia dalam rangka mengembalikan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi, baik secara bilateral dengan Belanda, secara Tri-Lateral, maupun dengan melibatkan organisasi PBB menemui jalan buntu. Penyiapan perang Indonesia menghadapi Belanda, mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. Konfrontasi militer Indonesia – Belanda juga disebabkan karena tidak adanya lembaga dunia yang efektif menyelesaikan permasalahan Papua.

#### **Penyebab Perang mempertahankan Papua Barat sebagai daerah jajahan bagi Belanda.**

Dominan disebabkan karena sebab-sebab ekonomi dan demografi. Dalam teori ekonomi sebagai penyebab Perang, sebagai bentuk persaingan ekonomi dalam sistem internasional yang kompetitif; perang dimaksudkan untuk perebutan pasar bagi sumber daya alam, dan kekayaan. Sehingga jelas, Negara Belanda nekad melakukan perang mempertahankan Papua karena membutuhkan daerah yang lebih luas untuk memungkinkan perpindahan warga Belanda ke Papua dan untuk menambah sumber penghasilan mereka sehingga rakyatnya akan hidup dengan lebih sejahtera. Papua dapat dieksploitasi kekayaan alamnya, didirikan perkebunan, dan industri guna meningkatkan ekonomi dan kemakmuran Belanda pasca kehancuran Perang Dunia ke-2. Disamping sebab Ekonomi, perang sangat erat kaitannya dengan kolonialisme dan imperialism yang dimiliki oleh Belanda.

#### **Strategi perang semesta Indonesia dalam rangka menghadapi konfrontasi militer pembebasan Papua Barat.**

##### **Tujuan (End)**

Strategi adalah seni/ketrampilan mendistribusikan dan menggunakan (Ways)

.....

sarana militer (Means) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (Ends). Tujuan dari konfrontasi pembebasan Papua adalah mengembalikan Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah Belanda, sebelum tahun 1964. Dengan demikian paling lambat pada tanggal 1 Januari 1964, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menegakkan kedaulatan secara mutlak di seluruh wilayah Papua Barat.

#### **Sarana dan Prasarana (Means)**

Sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, Indonesia juga menjadi lahan rebutan bagi penanaman pengaruh yang dilakukan oleh dua negara yang saling bermusuhan pasca berakhirnya Perang Dunia ke-2, yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Dua negara pemenang perang inilah yang kemudian saling berlomba mencari pengaruh dan meluaskan hegemoni keseluruh penjuru dunia. Presiden Soekarno dengan luhur memanfaatkan hal ini sebagai strategi untuk memperkuat kekuatan militer demi tujuan untuk mengembalikan wilayah Papua melalui konfrontasi bersenjata melawan Belanda.

Beberapa wilayah geografis yang paling diperdebatkan di Indo-Pasifik, yaitu Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Samudera Hindia.(Elisabeth Siahaan & Risman, 2020). Dan sadar akan geografi Indonesia sebagai negara maritime, Presiden Soekarno menyiapkan Angkatan Laut yang secara kalkulasi militer unggul dari kekuatan Angkatan Laut Belanda di perairan Papua Barat. Bahkan kekuatan Angkatan Laut Indonesia masa tersebut menjadi kekuatan yang terdepan di Kawasan.

Alutsista hasil diplomasi paksa Soekarno yaitu antara lain mendapatkan persenjataan tercanggih pada masanya, yaitu; Kapal Selam Kelas Whiskey 12 unit, Kapal Penyelajah Berat Kelas Sverdlov 1 unit yang diberi nama KRI Irian, Fregat kelas ringan 8 unit kapal, Kapal perusak kelas Skory 8 unit, Kapal Penyerang Cepat kelas Komar berpeluru kendali 16 unit, Kapal Cepat kelas P-6 Torpedo

14 unit, Kapal pemburu kapal selam kelas Kronstad 16 kapal, Kapal Penyapu Ranjau kelas T-43 sebanyak 6 unit, Kapal Meriam kelas BK 18 unit (Akbar,2017 hal 82).

Kapal-kapal selam kelas Wiskhey dari Uni Sovyet Ini telah dilengkapi torpedo paling canggih di zamannya, yang tentunya mampu melumpuhkan kapal induk Belanda. Tipe SAET-50, torpedo jenis baru yang dapat mencari sasarannya sendiri. Teknologi ini hanya dimiliki oleh Amerika dan Sovyet saat itu, dan Indonesia satusatunya di luar Amerika dan Uni Sovyet yang memiliki torpedo jenis tersebut.

Mobilisasi persenjataan juga dilakukan di Udara. Pada masa penyiapan konfrontasi merebut Papua menjadikan TNI AU kekuatan mengetarkan di bumi selatan, yaitu dengan memiliki; Pesawat pemburu supersonic MiG--21 Fishbed 20 unit, Pesawat pemburu MiG-15 30 unit, Pesawat tempur High subsonic MiG-17 49 unit, Pesawat tempur supersonic MiG-19 10 unit, Pesawat pembom jarak jauh Tupolev Tu-16 24 unit, Pesawat Pembom sedang Ilyusin – 28 18 unit, Pembom taktis B-25 Mitchell 4 unit, Pembom taktis B-26 Invader 2 unit, Helikopter angkut MI-6 9 helikopter, Helikopter serang darat MI-4 41 helikopter (Akbar, 2017 Hal 86).

Salah satu senjata yang menambah deterrent effect terhadap kekuatan militer Indonesia adalah kehadiran pesawat pembom canggih asal Sovyet yakni pesawat pembom strategis jarak jauh Tu (Tupolev) -16. Jumlah pesawat pembom yang di bawa pulang dari Sovyet sendiri itupun sampai berjumlah 24 buah. Indonesia mengakuisisi persenjataan ini sebagai jawaban untuk menghancurkan target yang paling dicari yakni kapal induk milik Belanda, Karel Doorman. Hal Ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di asia yang mempunyai pembom strategis, selain Amerika, Rusia, dan Inggris.

## Cara bertindak (Ways)

### Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Papua Barat

Mencermati dinamika influensial perkembangan lingkungan strategis yang mengemuka pada lingkup global, regional maupun nasional, arsitektur pertahanan Indonesia perlu dikonstruksikan dan disesuaikan dengan pola, bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. (Risman et al., 2018). Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TriKora). TriKora menandai dimulainya secara resmi konfrontasi militer Indonesia terhadap Belanda dalam rangka mengembalikan Papua ke pangkuan ibu pertiwi. Hal ini juga merupakan sebuah bentuk peringatan kepada pihak Belanda bahwa Indonesia akan melakukan apapun untuk merebut kembali wilayah Irian sekalipun itu dengan cara berperang (Akbar, 2011).

Isi dari seruan TriKora adalah: a). Gagalkan pembentukan negara Boneka Papua buatan Belanda; b). Kibarkan sang Merah Putih di Papua tanah air Indonesia; c). Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Sebagai langkah pertama pelaksanaan TriKora adalah pembentukan Komando Operasi, yang diberi nama, Komando Mandala Pembebasan Papua. Sebagai panglima komando adalah Brigjen Soeharto yang kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Sebagai Wakil Panglima I adalah Kolonel Laut Sudomo; Sebagai Wakil Panglima II adalah Kolonel Udara Leo Wattimena. Sedangkan sebagai Kepala Staf Gabungan adalah Kolonel Ahmad Tahir.

Komando Mandala yang bermarkas di Makasar ini mempunyai dua tugas, yaitu; a). Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan operasi militer untuk mengembalikan Papua ke dalam kekuasaan Republik Indonesia; b). mengembangkan situasi militer di wilayah Papua sesuai dengan perkembangan perjuangan

di bidang diplomasi supaya dalam waktu singkat diciptakan daerah daerah bebas de facto atau unsur pemerintah RI di wilayah Papua.

Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala membuat strategi dengan membagi operasi pembebasan Papua menjadi tiga fase, yaitu; 1) Fase infiltrasi. Dimulai pada awal Januari tahun 1962 sampai dengan akhir tahun 1962, dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran untuk menciptakan daerah bebas de facto. 2). Fase Eksploitasi. Dimulai pada awal Januari 1963 sampai dengan akhir tahun 1963, dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. 3). Fase Konsolidasi. Dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1964, dengan menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Papua.

Pada masa awal fase infiltrasi, pada 15 Januari 1962 tiga Motor Torpedo Boat (MTB) ALRI, yakni RI Macan Tutul, RI Harimau dan RI Macan Kumbang mulai melancarkan operasi-operasi rutin dengan mengadakan inspeksi di garis depan perbatasan untuk melihat rencana-rencana selanjutnya. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh Belanda, sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ini, MTB Macan Tutul ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya Komandan MTB Macan Tutul Komodor Yoshafat Sudarso. Beberapa saat sebelum tenggelam Komodor Yoshafat Soedarso sempat mengirimkan pesan kepada anak buahnya di kapal yang lain, yaitu “**kobarkan semangat pertempuran**”. (Sadhyoko, 2015)

### Konfrontasi Bidang Politik

Sejak masa demokrasi liberal, setiap cabinet mencantumkan program kerjanya mengenai pembebasan Irian Barat mulai dari kabinet Natsir hingga kabinet Djuanda. Beberapa mobilisasi politik melalui jalur diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah RI dalam memperjuangkan pengembalian Papua diantaranya adalah:

- 1) Konferensi Tingkat Menteri dalam rangka Uni Indonesia – Belanda Konferensi ini diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1950 dengan keputusan membentuk sebuah komisi yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil pemerintah Indonesia dan Belanda guna menyelidiki masalah Papua Hasil kerja komisi dilaporkan kepada Konferensi Tingkat Menteri kedua di Den Haag pada bulan Desember 1950. Namun upaya ini belum membuahkan hasil yang berarti dalam penyelesaian Papua.
- 2) Konferensi Asia-Afrika di Bandung. KAA diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955, dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Pada kesempatan itu Indonesia memanfaatkan moment KAA sebagai wahana untuk mencari dukungan dalam rangka membebaskan Papua.
- 3) Pembatalan Perundingan KMB. Pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB dengan UU No. 13 Tahun 1956. Dalam Undang-Undang itu ditetapkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Belanda adalah hubungan yang lazim antara Negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum Internasional. Dengan Undang-Undang itu bisa ditafsirkan bahwa Indonesia membubarkan Uni Indonesia – Belanda secara sepihak.
- 4) Diplomasi melalui PBB. Untuk pertama kalinya Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang Umum PBB pada tahun 1954. Usulan itu berisi agar PBB sebagai badan internasional yang menggalang persatuan bangsa-bangsa di dunia dapat membantu menyelesaikan masalah Indonesia - Belanda tentang Papua. Namun usulan dari Indonesia tidak mendapatkan dukungan yang berarti dari Negara-negara lain anggota PBB. Akhirnya bangsa Indonesia berkesimpulan

PBB tidak mampu membantu menyelesaikan masalah Papua dan memutuskan untuk mencari jalan lain yaitu lewat jalur konfrontasi.

Disamping kegiatan diatas, untuk mengesahkan kekuasaannya atas Papua pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Papua dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Papua ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Papua. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

#### **Konfrontasi Bidang ekonomi**

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Papua. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk mobilisasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut: 1) Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. 2) Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. 3) Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. 4) Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. 5) Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957.

Selain itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel

Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Papua Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

### **Konfrontasi Bidang Diplomasi**

Satu hal yang tak bisa dipungkiri, bahwa perang memakan biaya yang amat sangat besar, baik korban jiwa, harta benda maupun uang. Tidak hanya itu, keberadaan militer, dengan segala peralatannya, juga memakan biaya besar. (Wattimena, Reza A.A, 2018). Oleh sebab itu dibutuhkan dua hal. Yang pertama adalah alasan yang kuat bagi keberadaan militer itu sendiri. Keberadaan militer tidak hanya memakan biaya besar, tetapi juga membuat perang seolah menjadi jalan satu-satunya bagi setiap permasalahan yang muncul. Yang kedua adalah pengelolaan militer yang lebih profesional, terutama dalam hubungan antara militer dan sipil di panggung diplomasi politik. Diplomasi pertahanan juga telah digunakan dalam promosi hubungan sipil-militer guna mendukung stabilitas keamanan (Nyathi & Risman, 2020).

Paska diumumkan Trikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih John Fitzgerald Kennedy merasa risau dengan Sekutu-nya Belanda di Papua. Berdasarkan laporan dari pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat yang mengintai langsung secara rahasia dari udara terlihat telah dilakukan persiapan besar-besaran dalam pengerahan dan pergelaran kekuatan militer Indonesia dalam kampanye merebut Papua. Pesawat mata-mata ini diterbangkan dari Filipina ke Darwin untuk misi pengintaian. Dari ketinggian 7000 kaki, pesawat ini berhasil mengidentifikasi kekuatan militer yang tengah

dipersiapkan oleh Indonesia. Saat itu melalui pengamatannya terbukti sudah bahwa Indonesia sudah dilengkapi ratusan pesawat tempur canggih dan juga beberapa puluh pesawat pembom. Data intelijen inilah yang dijadikan dasar pertimbangan Amerika Serikat untuk mendesak Belanda mengakhiri pendiriannya untuk tetap mempertahankan Papua Barat.

Presiden Kennedy meminta bantuan Sekjen PBB U Than, Kennedy mengirimkan diplomatnya yang bernama Elsworth Bunker untuk mengadakan pendekatan kepada Indonesia – Belanda. Sesuai dengan tugas dari Sekjen PBB (U Than), Elsworth Bunker pun mengadakan penelitian masalah ini, dan mengajukan usulan yang dikenal dengan “Proposal Bunker”. Adapun isi Proposal Bunker tersebut intinya adalah; Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Irian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun. Usulan ini menimbulkan reaksi, dari pihak Indonesia meminta supaya waktu penyerahan diperpendek. Sedangkan dari pihak Belanda setuju melalui PBB, tetapi tetap diserahkan kepada Negara Papua Merdeka.

Setelah operasi Jayawijaya melaksanakan infiltrasi mengepung beberapa kota penting di Papua, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1962 di markas besar PBB dilaksanakan perundingan yang menghasilkan suatu resolusi penghentian tembak menembak pada tanggal 18 Agustus 1962. Belanda akhirnya bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan New York, yaitu: 1). Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar Papua. 2). Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera merah putih

berkibar disamping bendera PBB. 3). Pemulangan anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963. 4). Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima penyerahan pemerintahan Papua dari tangan PBB. Dan 5). Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Papua, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Papua menjadi propinsi ke 26. Nama Papua Barat diubah menjadi Irian Jaya (sekarang Papua dan Papua Barat). Penentuan pendapat Rakyat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 4 Agustus 1969. Mereka diberi dua opsi, yaitu: bergabung dengan RI atau merdeka sendiri. Setelah Pepera dilaksanakan, didapat hasil mereka memilih dengan suara bulat mendukung bergabung dengan Indonesia, Papua secara internasional diakui sebagai provinsi Indonesia (Kuitenbrouwer, 2016).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari Eksplanasi dan tinjauan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut; Konfrontasi militer pembebasan Papua Barat adalah merupakan interpretasi dari strategi perang semesta. Konfrontasi pembebasan militer Papua Barat terbukti memobilisasi kekuatan militer Indonesia, memobilisasi kekuatan politik, Diplomasi, Ekonomi, Sosial dan penduduk. Khusus mobilisasi kekuatan militer terutama Angkatan Laut dan Udara, mampu menjadikan kekuatan militer Indonesia disegani di bumi Selatan Katulistiwa. Dengan kekuatan militer yang dapat menghadirkan Efek Pengetar tersebut, membuat lebih tangguh

dan efektif diplomasi Indonesia mengembalikan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1962.

### Saran

Mencermati kekayaan alam Indonesia, pemastian kelancaran program pembangunan, menjaga kedaulatan dan kehormatan negara, sangat memerlukan Angkatan Bersenjata yang disegani dan mampu menghadirkan Daya Gentar "*Deterrence Effect*". sehingga dapat menghilangkan niat negara asing yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan alam, mengklaim pulau, mengganggu jalannya pembangunan nasional dan mengancam kedaulatan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, F. V. (2011). *Konfrontasi Bersenjata Merebut Irian Barat* (Rachmad Gustomy (ed.)). Research Centre for Politics and Government.
- [2] Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Edisi ke-2). Kencana.
- [3] Clausewitz, C. Von. (1976). *Carl Von Clausewitz On War, (translated by Michael Howard and Peter Paret)* (M. H. and P. Paret (ed.)). Princeton University Press.
- [4] Coccia, M., & National, I. (2019). Theories and the reasons for war: a survey. *Journal of Economic and Social Thought*, 6(2), 115–124.  
<https://doi.org/10.1453/jest.v6i2.1890>
- [5] Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Keempat). Pustaka Pelajar.
- [6] Elisabeth Siahaan, S. Y., & Risman, H. (2020). Strengthening Asean Centrality Within the Indo-Pacific Region. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 6(1), 254–266.  
<https://doi.org/10.20319/pijss.2020.61.254>

- [7] Jackson, M. O., & Morelli, M. (2011). The reasons for wars: An updated survey. *The Handbook on the Political Economy of War*, December, 34–57. <https://doi.org/10.4337/9781849808323.0009>
- [8] Kuitenbrouwer, V. (2016). Beyond the ‘Trauma of Decolonisation’: Dutch Cultural Diplomacy during the West New Guinea Question (1950–62). *Journal of Imperial and Commonwealth History*, 44(2), 306–327. <https://doi.org/10.1080/03086534.2016.1175736>
- [9] Leirissa, R. Z. et al. (1992). *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [10] Nasution, A. H. (1954). *Pokok-pokok Gerilya (Fundamentals of Guerilla Warfare)*. Dinas Sejarah Angkatan Darat.
- [11] Nyathi, G. L., & Risman, H. (2020). Africa’s Search for Peace and Stability: Defense Diplomacy and Conflict Resolution in the Democratic Republic of Congo (Drc). *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(2), 138. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i2.720>
- [12] Octavian, A. (2012). *Militer dan Globalisasi: Studi sosiologi militer dalam konteks globalisasi dan kontribusinya bagi Transformasi TNI* (kedua). UI Press.
- [13] Reza A.A Wattimena. (2018). Bisakah Perang Dihindari? *Ary Suta Center Series for Strategic Management Oktober 2018 Vol 43, 43*(October). <https://www.researchgate.net/publication/328411865>
- [14] Ricklefs, M. C. (1981). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi Ilmu Semesta.
- [15] Risman, H., Widodo, P., & Sumertha, G. K. (2018). Kebijakan strategis pemberdayaan diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(2), 37–58.
- [16] Rollings, L. B. (2010). *The West Papua dilemma*. Research Online University of Wollongong. <http://ro.uow.edu.au/theses/3276>
- [17] Sadhyoko, J. A. (2015). Pertempuran Laut Aru: Tonggak awal penanaman jiwa bahari. *Humanika*, 22(2).
- [18] Simatupang, T. (1960). *Laporan Dari Banaran* (Ketiga). PMK HKBP Jakarta.
- [19] Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah; Teori, Metode dan Contoh Aplikasi*. Pustaka Setia Bandung.
- [20] Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [21] Tippe, S. (2015). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Penerbit Salemba Humanika.
- [22] van der Dennen, J. M. G. (2005). On War: Concepts, Definitions, Research Data. *Yearbook on Peace and Conflict Studies*, 128–189. <https://core.ac.uk/download/pdf/12857871.pdf>
- [23] Yayasan, 19 Desember 1948. (1994). *Perang Rakyat Semesta*. Balai Pustaka.